



SM/Siswo Aribowowo

PAPARKAN MATERI : Pengamat politik Undip, Teguh Yuwono (kiri) menjadi narasumber dialog dan rapat koordinasi perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se Jawa Tengah dan berbagai unsur di Ruang Cendrawasih Kantor Kesbangpol Jawa Tengah, Semarang, kemarin. (31)

Indeks Demokrasi Jawa Tengah Rendah

SEMARANG - Indeks Demokrasi Jawa Tengah masih di bawah standar nasional. Untuk itu, diperlukan upaya konkret supaya bisa sesuai standar nasional dan tidak ketinggalan.

“(Indeks Demokrasi) Jawa Tengah masih di bawah standar nasional. Masih tergolong lemah, perlu didorong supaya naik,” kata pengamat politik Undip Semarang, Teguh Yuwono saat menjadi narasumber dalam dialog dan rapat koordinasi dengan perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Jawa Tengah dan berbagai unsur di ruang Cendrawasih Kantor Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Jalan Ahmad Yani No 160 Semarang, kemarin.

Dijelaskannya, berdasarkan data dari

Badan Statistik Nasional (BPS), capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah 2017 adalah 70,85. Angka ini di bawah capaian nasional 72,11.

Menurutnya, ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan itu. Di antaranya, peningkatan pengetahuan, kesadaran, komitmen dan toleransi masyarakat terhadap kebebasan berseikat serta berkumpul tanpa kekerasan. Selanjutnya, menjaga, memelihara dan mempertahankan jaminan, penegakan hu-

kum, komitmen masyarakat, menghindari ancaman penggunaan kekerasan yang diskriminatif terhadap gender, etnis dan kelompok tertentu. Terakhir, mempertahankan nilai-nilai moral hakim agar bertindak profesional, adil, jujur demi tegaknya hukum yang benar.

“IDI dibagi menjadi tiga aspek, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Ketiganya saling berkaitan,” urainya.

Kebebasan Sipil

Teguh merinci, kebebasan sipil dapat dilihat dari beberapa variabel, seperti kebebasan berkumpul, berpendapat, berkeyakinan, serta bebas diskriminasi. Kemudian, untuk hak politik di antaranya, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengam-

bilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, serta pemilu yang bebas dan adil. Terakhir, lembaga demokrasi meliputi peran DPRD, partai politik, birokrasi pemerintahan daerah, serta peradilan yang independen.

Narasumber lain, Kepala BPS Jawa Tengah, Sentot Bangun Widoyono menambahkan, persentasi IDI provinsi se Indonesia pada 2017 yang rendah adalah Papua yakni 61,34. Sementara yang tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 84,73, Jawa Tengah 70,85, dari ukuran normal capaian nasional 72,11.

“Dari data tersebut, IDI Jawa Tengah masuk kategori sedang. Kategori indeks baik rata rata di atas 80. Angka 60-80 masuk sedang. Di bawah 60 masuk kategori jelek,” imbuhnya. (arw-31)